



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 14794-14802

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Penerimaan Daerah sebagai Aspek Penting Penentu Belanja Modal Pemerintah: Studi pada Pemerintah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2023-2025

Mia Yulianti, Asrudin Hormati, Rinto Syahdan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun

[miayulianti31072003@gmail.com](mailto:miayulianti31072003@gmail.com), [asrudinhormati@unkhair.ac.id](mailto:asrudinhormati@unkhair.ac.id), [rintosyahdan@gmail.com](mailto:rintosyahdan@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai apakah Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana masing-masing komponen pendapatan daerah tersebut berperan dalam menentukan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara selama periode 2023 hingga 2025. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi data panel untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara lebih akurat dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal dipengaruhi secara signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini mengindikasikan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui belanja modal. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan besarnya belanja modal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya PAD dan DAK, guna meningkatkan kapasitas pembiayaan belanja modal.

Kata kunci: PAD, DAU, DAK, Belanja Modal.

### 1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk membiayai program pembangunan, terutama dalam bentuk belanja modal yang ditujukan untuk penyediaan infrastruktur, fasilitas publik, serta aset tetap lainnya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Belanja modal menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pelayanan publik.

Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Penerimaan daerah, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi sumber utama pembiayaan belanja pemerintah daerah. Penerimaan ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonominya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Khulwani et al. (2022), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan signifikan dalam mendukung belanja modal, di mana peningkatan PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk memperluas pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain PAD, terdapat pula sumber pendapatan lain yang menjadi bagian dari penerimaan daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah. Kedua jenis dana ini berfungsi untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah serta mendukung pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional (Marliana et al., 2022).

Namun, dalam praktiknya, tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih tergolong tinggi, terutama pada daerah dengan PAD yang relatif kecil seperti di Provinsi Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Keterbatasan infrastruktur, distribusi sumber daya manusia, dan aksesibilitas antarwilayah menjadi hambatan dalam meningkatkan PAD yang berkelanjutan. Menurut Prasetya (2021), daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah cenderung mengalami kesulitan dalam meningkatkan belanja modal karena sebagian besar anggarannya terserap untuk belanja rutin seperti belanja pegawai dan operasional. Hal ini juga tercermin pada struktur APBD di beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara yang menunjukkan dominasi belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal.

Belanja modal merupakan instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Fernandes dan Putri (2022) mengungkapkan bahwa investasi pemerintah melalui belanja modal dapat memberikan efek ganda terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Dengan meningkatnya belanja modal, ketersediaan sarana dan prasarana publik akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperluas basis pajak daerah. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara penerimaan daerah dan belanja modal; semakin besar penerimaan daerah, semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan jangka panjang.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh penerimaan daerah terhadap belanja modal. Misalnya, penelitian Agustin dan Budiwitjaksono (2022) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sementara itu, penelitian Aisyah Nasution et al. (2023) di Sumatera Utara menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal, dengan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penguat dalam hubungan tersebut. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Soni Kurniawan dan Arifin (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mampu memoderasi pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal, namun tidak mampu memoderasi pengaruh dana bagi hasil.

Penelitian lain oleh Safriyeni dan Hidayat (2024) menegaskan bahwa ketiga komponen utama penerimaan daerah—PAD, DAU, dan DAK—memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan belanja modal, terutama pada daerah berkembang seperti Sumatera Barat dan Kalimantan. Temuan serupa dikemukakan oleh Yudi Hermawan et al. (2021) di Provinsi Kalimantan Tengah yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan dana perimbangan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dasar.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, studi mengenai hubungan antara penerimaan daerah dan belanja modal di Provinsi Maluku Utara masih sangat terbatas. Padahal, wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang unik serta tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini dilakukan, karena hasilnya dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana penerimaan daerah berkontribusi terhadap peningkatan belanja modal pemerintah di Maluku Utara pada periode 2023–2025.

Sapto Darmawati et al. (2025) menegaskan bahwa dinamika belanja modal daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besaran penerimaan, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan anggaran serta kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai hubungan finansial antara penerimaan dan belanja, tetapi juga mencoba mengidentifikasi faktor-faktor kebijakan yang berpotensi memperkuat efektivitas belanja modal di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini relevan karena berpotensi memberikan kontribusi empiris terhadap kebijakan fiskal daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Menurut Eka Purwati dan Firmansyah (2024), peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dapat memperkuat hubungan positif antara kinerja keuangan dan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar penerimaan daerah benar-benar dapat dialokasikan secara optimal untuk mendukung pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat menekankan pentingnya efisiensi belanja publik dan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Upaya peningkatan PAD menjadi prioritas strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Sejalan dengan pandangan Satria Himawan et al. (2024) yang menemukan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung memiliki struktur belanja yang lebih produktif karena lebih leluasa dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa selama periode 2023–2025, belanja modal di Provinsi Maluku Utara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Sementara PAD mengalami tren kenaikan, namun peningkatan tersebut belum diimbangi dengan kenaikan proporsional pada belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidakefisienan dalam pemanfaatan penerimaan daerah untuk pembangunan infrastruktur. Kajian dari Teguh Raharjo dan Harnovinsah (2021) menegaskan bahwa struktur keuangan daerah yang terlalu bergantung pada transfer pusat akan menghambat fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola alokasi belanja modal secara optimal.

Penelitian ini juga memiliki relevansi praktis bagi pemerintah daerah di Maluku Utara, karena dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan daerah yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Menurut Dwi Anggraeni dan Sapari (2023), penguatan PAD harus diimbangi dengan pengelolaan belanja yang tepat sasaran agar tercipta efisiensi dan efektivitas fiskal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hubungan antara penerimaan daerah dan belanja modal menjadi penting dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mencapai pembangunan yang inklusif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah memegang peran penting sebagai penentu utama dalam kebijakan belanja modal pemerintah daerah. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana komponen penerimaan, terutama PAD, DAU, dan DAK, mempengaruhi tingkat dan kualitas belanja modal di Provinsi Maluku Utara selama periode 2023–2025.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara dengan waktu pelaksanaan selama satu bulan, yaitu pada Oktober sampai November 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara periode 2023–2025 yang terdiri dari 10 kabupaten/kota. Sampel penelitian menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data tersebut diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada alamat ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Maluku Utara periode 2023 sampai 2025 yang diakses melalui situs resmi tersebut.

## 3. Hasil dan Diskusi

Provinsi Maluku Utara, sebagai unit observasi dalam penelitian ini, merupakan wilayah kepulauan yang secara administratif resmi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Secara geografis, provinsi ini memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya pada sektor pertambangan dan perikanan yang menjadi motor utama penggerak ekonomi daerah. Selama periode pengamatan tahun 2023 hingga 2025, Maluku Utara menunjukkan dinamika pembangunan yang signifikan, di mana pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Kota Sofifi dan Kota Ternate sebagai pintu gerbang utama logistik dan transportasi. Dalam struktur keuangannya, Provinsi Maluku Utara sangat mengandalkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana transfer untuk membiayai berbagai agenda pembangunan infrastruktur melalui belanja modal. Ketergantungan terhadap penerimaan daerah ini menjadi aspek penting mengingat karakteristik wilayahnya yang terdiri dari gugusan pulau, sehingga membutuhkan alokasi belanja modal yang besar untuk membangun konektivitas dan fasilitas publik. Hingga proyeksi tahun 2025, pengelolaan fiskal di Maluku Utara diarahkan pada penguatan kemandirian daerah guna memastikan bahwa setiap rupiah dari penerimaan daerah mampu dikonversikan menjadi aset tetap yang produktif.

### 3.1 Hasil Uji Statistik

#### 1) Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

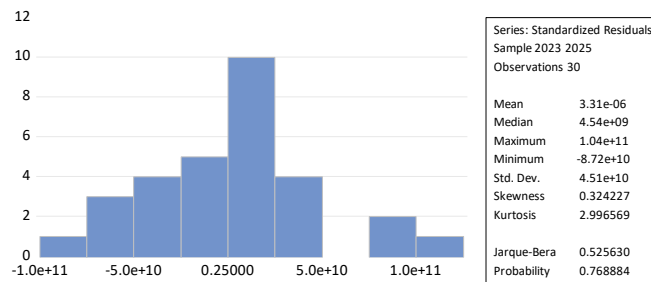
Tabel 1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	BM	PAD (Rp)	DAU (Rp)	DAK (Rp)
Rata-rata	202.000	74.050	124.993	162.634
Nilai Tengah	165.000	56.600	113.000	153.000
Maksimum	596.860	254.930	274.950	343.040
Minimum	33.270	5.120	86.570	64.710
Std. Dev	138.426	67.089	38.960	65.540
Sum	6.050	2.200	3.750	4.880
Sum Sq. Dev	556.000	131.000	44.000	125.000
Observations	30	30	30	30

Berdasarkan tabel diatas, pada variabel Belanja Modal (Y) menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 201.666.666.667, dengan nilai tertinggi sebesar 595.860.000.000 yang terjadi pada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024, serta nilai terendah sebesar 33.270.000.000 yang terjadi pada Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2025, dengan nilai standar deviasi sebesar 138.426.000.000. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 74.050.000.000, dengan nilai tertinggi sebesar 254.930.000.000 yang terjadi pada Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2025, serta nilai terendah sebesar 5.120.000.000 yang terjadi pada Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2025, dengan nilai standar deviasi sebesar 67.089.471.809. Pada variabel Dana Alokasi Umum (X2) menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 124.993.333.333, dengan nilai tertinggi sebesar 274.950.000.000 yang terjadi pada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2023, serta nilai terendah sebesar 86.570.000.000 yang terjadi pada Kabupaten Kepulauan Taliabu tahun 2025, dengan nilai standar deviasi sebesar 38.960.703.751. Sementara itu, pada variabel Dana Alokasi Khusus (X3) menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 162.634.333.333, dengan nilai tertinggi sebesar 343.040.000.000 yang terjadi pada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2023, serta nilai terendah sebesar 64.710.000.000 yang terjadi pada Kabupaten Kepulauan Taliabu tahun 2025, dengan nilai standar deviasi sebesar 65.540.226.378.

## 2) Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Pada Gambar diatas dapat dilihat nilai Jarqui-Bera sebesar 0,525630 dengan nilai probability 0,768884. Maka dapat disimpulkan model pada penelitian ini terdistribusi normal, karena nilai probability 0,768884 lebih besar dari 0,05.

### b. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1,000000	0,418514	0,158721
X2	0,418514	1,000000	0,701707
X3	0,158721	0,701707	1,000000

Berdasarkan hasil diatas, dapat dilihat semua korelasi antara variabel tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Artinya pada model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas atau dalam model ini tidak terdapat korelasi antara variabel.

## 3) Pemilihan Model Regresi Data Panel

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8138>  
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Regresi data panel dapat dilakukan dengan menguji tiga model analisis, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pemilihan model yang tepat bergantung pada asumsi yang digunakan oleh peneliti serta pemenuhan syarat-syarat dalam pengolahan data statistik yang benar sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan model yang paling sesuai dari ketiga model tersebut. Dalam menentukan model yang tepat, digunakan beberapa pengujian, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM) sebagai dasar dalam pemilihan model regresi data panel.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.805391	(9,17)	0,0002
Cross-section Chi-square	49.066417	9	0,0000

Berdasarkan hasil pada Tabel diatas, menunjukkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model yang terpilih adalah Common Effect Model (CEM). Namun, jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM), sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut menggunakan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara fixed effect atau random effect.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.696973	3	0,0005

Berdasarkan hasil pada Tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas cross-section random sebesar  $0,0005 < 0,05$  yang berarti Fixed Effect Model (FEM) terpilih pada hasil uji Hausman. Dengan demikian, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-207.000	87.100	-2.372225	0,0297
X1	2.395490	0.442727	5.410760	0,0000
X2	0.850325	0.819083	1.038143	0,3137
X3	0.766450	0.336822	2.275531	0,0361

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.6, maka persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = -207.000 + 2,395X1 + 0,850X2 + 0,766X3 + e$$

Model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar -207.000 menunjukkan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) bernilai 0, maka Belanja Modal (Y) bernilai -207.000.
- Koefisien regresi X1 (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 2,395 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada PAD akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 2,395 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- Koefisien regresi X2 (Dana Alokasi Umum) sebesar 0,850 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada DAU akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,850 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

- Koefisien regresi X3 (Dana Alokasi Khusus) sebesar 0,766 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada DAK akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,766 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

#### 4) Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, di mana jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen berpengaruh signifikan. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan, dan jika nilai signifikansi  $F < 0,05$  maka seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.7, nilai prob (F-statistic) sebesar  $11,92162 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen, di mana nilai Adjusted  $R^2$  yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan model yang semakin baik.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Parsial (Uji T)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-207.000	87.100	-2.372225	0,0297
X1	2.395490	0.442727	5.410760	0,0000
X2	0.850325	0.819083	1.038143	0,3137
X3	0.766450	0.336822	2.275531	0,0361
Uji Simultan (F)				
F-statistic				11,92162
Prob (F-statistic)				0.000005
Uji Koefisien Determinasi $R^2$				
R-squared				0,893789
Adjusted R-squared				0,818817

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai signifikansi  $0,0000 < 0,05$  dan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Dana Alokasi Umum (X2) memiliki nilai signifikansi  $0,3137 > 0,05$  sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, maka hipotesis kedua (H2) ditolak. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki nilai signifikansi  $0,0361 < 0,05$  sehingga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai prob (F-statistic) sebesar  $11,92162 > 0,05$ , yang berarti secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,818817, yang berarti bahwa 81,88% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan sisanya 18,12% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

### 3.2. Pembahasan

#### 1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah optimal sehingga menyebabkan potensi pendapatan terealisasi secara maksimal, sehingga terjadi peningkatan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dalam wilayah yurisdiksinya yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, dan perlu terus didorong pertumbuhannya agar dapat membiayai sebagian belanja yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Puspita Sari dan Armelly (2025), Sapto Darmawati et al. (2025), Siska Manurung et al. (2025), Susanti dan Fahlevi (2016), Dwi Jayanti (2020), serta Julyano Sema dan Riduwan (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap

Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Prasetya (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## 2) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana belum sepenuhnya tepat sasaran serta adanya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan dana transfer secara produktif, sehingga tidak terjadi peningkatan Belanja Modal. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Citra dan Kurnia (2024), Syahdila Putri dan Sishadiyati (2021), serta Claudia Melgiana et al. (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Yuliani et al. (2021) dan Fahreizi et al. (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## 3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di sepuluh kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. DAK berperan dalam meningkatkan kapasitas produktif daerah melalui investasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi yang mendorong efisiensi aktivitas ekonomi. Selain itu, alokasi DAK pada sektor pendidikan dan kesehatan turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus merupakan dana dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kebutuhan khusus daerah, termasuk pengadaan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang. Melalui DAK, pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan fasilitas publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bukit dan Alhudhori (2020), Anggun Priyono dan Khotimah (2023), serta Iqbal et al. (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun, penelitian Sapto Darmawati et al. (2025) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas data penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal sehingga hipotesis pertama (H1) diterima, yang menunjukkan bahwa pengelolaan PAD yang optimal mampu meningkatkan realisasi pendapatan dan berdampak pada peningkatan Belanja Modal. Selanjutnya, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak, yang disebabkan oleh alokasi dana yang kurang tepat sasaran serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan dana transfer secara produktif, sehingga tidak mendorong peningkatan Belanja Modal. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima, karena DAK mampu meningkatkan kapasitas produktif daerah melalui investasi infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta jaringan telekomunikasi, dan juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya mendorong peningkatan realisasi Belanja Modal. Kesimpulannya, seharusnya tidak ada referensi. Kesimpulan berisi fakta yang didapat, cukup menjawab masalah atau tujuan penelitian (jangan menjadi diskusi lagi). Nyatakan kemungkinan aplikasi, implikasi, dan spekulasi yang sesuai. Jika diperlukan, berikan saran untuk penelitian lebih lanjut. Nyatakan kesimpulan dengan cara yang terukur dan dalam kalimat berbentuk paragraf, bukan dalam bentuk *penomoran/daftar item*.

## Referensi

1. Agustin, D. T., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2019-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 416–419. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.548>
2. Aisyah Nasution, S., Marinah Valentin, P., Sarumaha, A., Manurung, A., & Munawarah. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1841–1852. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1628>
3. Anggun Priyono, I., & Khotimah, H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Jawa Timur Tahun 2019-2021. *Trilogi Accounting and Business Research*, 04(02), 235–245. <https://www.trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/TABR/article/view/1802>
4. Bukit, P., & Alhudhuri, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 110–117. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i2.202>
5. Citra, Y., & Kurnia. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(3), 2–24. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5831>
6. Claudia Melgiana, A., Wayan Rupa, I., & Putu Riasning, N. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 45–49. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jraw/article/download/1543/1144>
7. Dwi Angrani, R., & Sapari. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. 12(7), 1–19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5435>
8. Dwi Jayanti, F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(3), 335–341. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/30045>
9. Eka Purwati, Y., & Firmansyah, A. (2024). Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan dalam Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 4877–4888.
10. Fahrezi, F., Hasanah, N., & Gusti Ketut Agung Ulupui, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2(1), 141–157. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/japa/article/view/30294>
11. Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
12. Ika Puspita Sari, E., & Armelly. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jambi. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 528–542. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/5501>
13. Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 5(2), 1–13. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jmi/article/view/3422>
14. Julyano Sema, L., & Riduwan, A. (2021). Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(5), 2–22. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3985>
15. Khulwani, I., Rinofah, R., & Prima Sari, P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016–2020. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1050–1068. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.776>
16. Marlina, R., Slamet Prasetyo, A., & Dwi Yulianto, P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 2(2), 620–640. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
17. Prasetya, F. (2021). Penerimaan Daerah sebagai Aspek Penting Penentu Belanja Modal Pemerintah: Studi pada Pemerintah Banyuwangi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(1), 69–85. <https://doi.org/10.33603/jka.v5i1.4376>
18. Safriyeni, & Hidayat, T. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ekobistek*, 13(4), 249–255. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i4.865>
19. Sapto Darmawati, S., Gheifira Laudy, N., Sudaryono, & Mujiyani. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2023. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.56127/jaman.v5i1.2114>
20. Satria Himawan, H., Mubarak, A., Wahyuni, E., Eka Sari, E., & Sukmawati, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Indonesia. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 7–13. <https://doi.org/10.52300/blnc.v16i1.12544>
21. Siska Manurung, S., Sembiring, S., & Parhusip, P. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 92–105. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/4707>
22. Soni Kurniawan, D., & Arifin, A. (2024). Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating di Jawa Tengah Tahun 2019-2021. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 1764–1778. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.6077>
23. Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191. <https://www.neliti.com/publications/187047/pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dana-alokasi-umum-dan-dana-bagi-hasil-terhadap-b>
24. Syahdila Putri, A. M., & Sishadiyati. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 85–93. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.10985>
25. Yudi Hermawan, P., Tiawon, H., & Neneng, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 2(3), 242–248. <https://doi.org/10.37304/jem.v2i3.4384>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8138>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

26. Yuliani, Surya Abbas, D., & Zulman Hakim, M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*, 693–701. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PSNCFEIB/article/view/5224>